

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2003, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (edisi revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Danang Widoyoko *et al.*, 2005, *Saksi yang Dibungkam*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 2003, *dari Pengadilan Militer Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2006, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hendrastanto Yudowidagdo *et al.*, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. M. A. Kuffal, 2002, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sayyid Sabiq, 1988, *Fiqih Sunnah (14)*, Alma'arif, Bandung.

S. M. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Tempo, Nasional, Jakarta, Minggu, 13 Mei 2007, hlm. 40-41.

Kompas, Metropolitan, Jakarta, Jumat, 1 September 2006, hlm. 26, kol. 6-7.

Peraturan Hukum Islam :

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Al-Hadits

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

R. I., Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

R.I., Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

R.I., Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

R. I., Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- R. I., Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- R. I., Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- R. I., Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- R. I., Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- R. I., Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- R. I., Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.
- R. I., Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.